



# Dinamika Ekonomi Hijau Indonesia: *Past for the Future*

**Penulis**

Surya Widiasti | Erna Rachmawati

## Era Ekonomi Hijau Dimulai

Gagasan mengenai Ekonomi Hijau (*Green Economy*) adalah bentuk pengembangan dari konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Pembangunan berkelanjutan lahir dari keresahan dunia mengenai pembangunan yang begitu masif di era 70-an. Saat itu pembangunan di berbagai negara bertumpu pada tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka pendek dan perencanaan pembangunan ekonominya kurang memperhatikan keberlanjutan dalam jangka Panjang. Kemudian tahun 1987, *World Commission on Environment and Development (WCED)*, komisi bentukan PBB untuk membuat laporan kondisi pembangunan dunia saat itu dan memaparkan konsep pembangunan berkelanjutan sebagai solusinya. Pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka di masa depan.

Ekonomi Hijau dirumuskan sebagai bentuk penjabaran lebih rinci dari konsep pembangunan berkelanjutan. *United Nation Environment Programme (UNEP)* mendefinisikan ekonomi hijau sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan sekaligus mencegah peningkatan emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim melalui aktivitas ekonomi yang rendah karbon, efisiensi sumber daya, serta bersifat sosial inklusif.

Di Indonesia konsep Ekonomi Hijau sesungguhnya telah dimulai dengan terbitnya UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk merespon konsep Pembangunan Berwawasan Lingkungan yang dicanangkan Pemerintah Indonesia kala itu. Namun, untuk konsep Ekonomi Hijau secara resmi mulai diadaptasi setelah UNEP meluncurkan *Green Economy Initiative (GEI)* pada akhir 2008 untuk menjadi dorongan bagi negara-negara anggota PBB untuk menerapkan konsep ekonomi hijau.

Sejalan dengan konsep Ekonomi Hijau, Bappenas meluncurkan *Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap (ICCSR) 2010-2029* untuk mengurangi potensi perubahan iklim atas aktivitas ekonomi yang tidak berkelanjutan. Indonesia bahkan turut menggagas *Global Green Growth Initiative (GGGI)* pada 2012, tepat 20 tahun pasca Konferensi PBB di Rio de Janeiro tentang Pembangunan Berkelanjutan. Melalui kolaborasi Indonesia dengan GGGI inilah Program Pertumbuhan Ekonomi Hijau Indonesia berjalan hingga saat ini di beberapa daerah sebagai *pilot project* untuk dikembangkan secara nasional dalam jangka panjang.

Gagasan  
Pembangunan  
Berkelanjutan  
1980-an

Konsep Ekonomi  
Hijau oleh UNEP  
2008

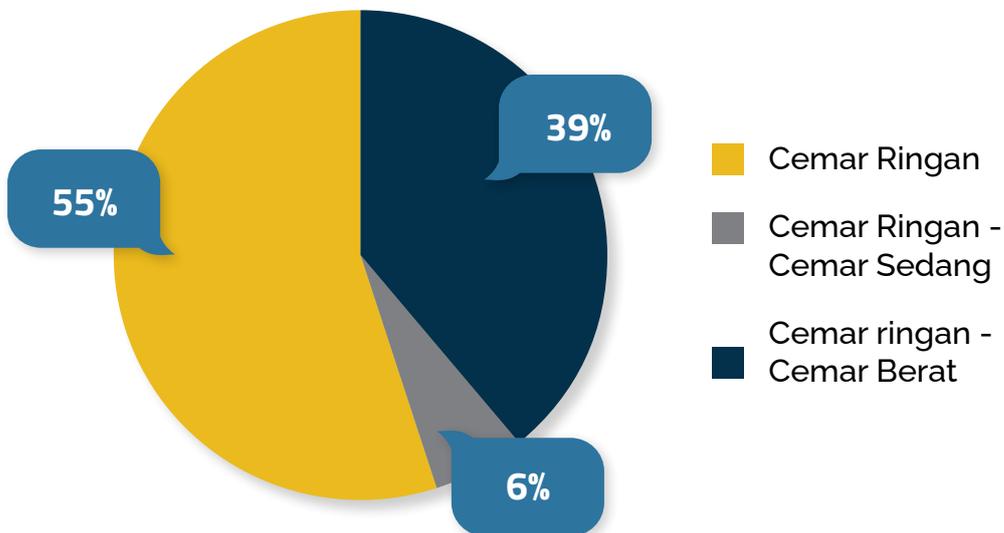
Langkah  
Indonesia dalam  
Implementasi  
Ekonomi Hijau

## Urgensi Ekonomi Hijau bagi Indonesia

Indonesia adalah negara besar dengan jumlah penduduk mencapai 267 juta jiwa, kekayaan alam yang beragam, dan ekonomi yang terus tumbuh. Bahkan, IMF memprediksi Indonesia akan masuk dalam 5 negara dengan perekonomian terbesar di dunia bersama India menggantikan UK dan Jerman. Namun, prediksi menggembirakan ini mendapat tantangan besar dari dunia internasional bagi Indonesia untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang terjadi adalah pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan termasuk penerapan prinsip-prinsip dari Ekonomi Hijau.

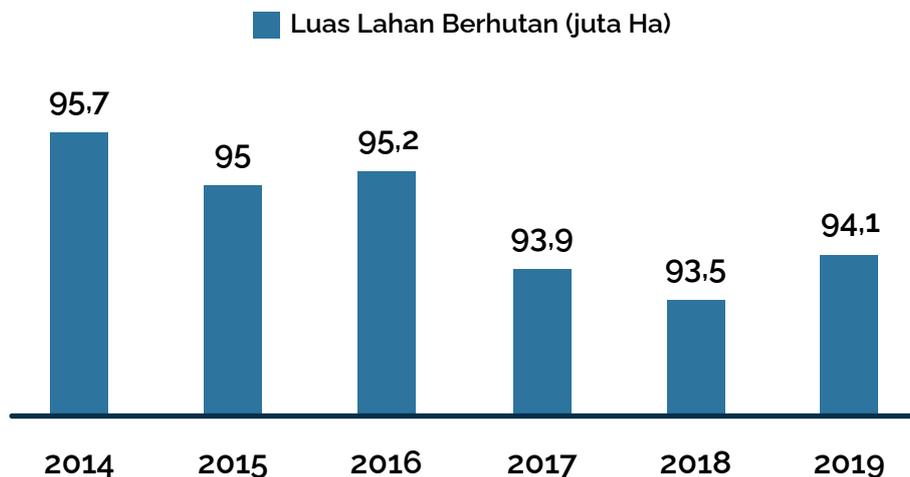
### Mengapa prinsip Ekonomi Hijau harus diimplementasikan oleh Indonesia?

#### Persentase Sungai Tercemar 2019

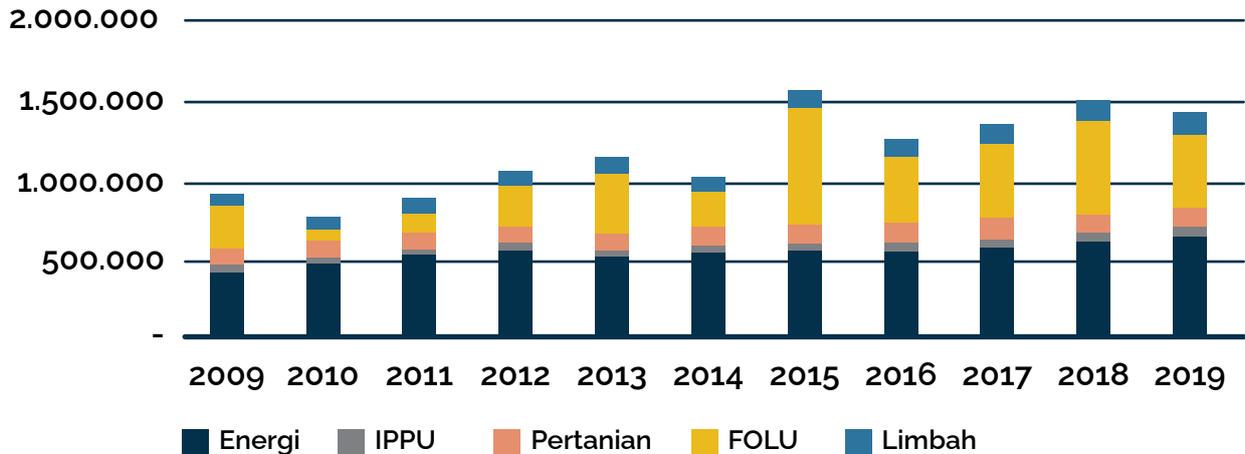


Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2020

#### Luas Lahan Berhutan Indonesia



## Profil Emisi Gas Rumah Kaca Indonesia 2009-2019



Sumber: Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring KLHK 2020

Kondisi lingkungan di Indonesia saat ini ditemukan fakta bahwa hampir setengah dari jumlah sungai yang tercatat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berada dalam status tercemar sedang hingga berat. Kondisi sungai yang demikian akan berpeluang mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan. Jenis bahan pencemar belum disajikan secara rinci, namun terlepas dari jenis bahan pencemar ini kondisi sungai yang tercemar dapat memengaruhi kesehatan makhluk hidup di sekitar aliran sungai tersebut.

Indikator lain dari keberlanjutan lingkungan adalah luas lahan berhutan. Hutan menyimpan keanekaragaman vegetasi yang akan bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia dalam jangka panjang. Namun, dalam enam tahun (2014-2019) luas lahan berhutan di Indonesia terus menurun. Angka penurunannya mencapai 1,6 juta Ha.

Kemudian dari sisi kualitas udara, analisa berdasarkan profil emisi gas rumah kaca (GRK) Indonesia dalam sepuluh tahun emisi GRK memiliki tren naik. Tahun 2009 jumlah emisi GRK sebesar 1.197.412 CO<sub>2e</sub> dan pada 2019 sebesar 1.866.552 CO<sub>2e</sub>, naik sebesar 669.140 CO<sub>2e</sub> dalam rentang waktu sepuluh tahun. Tercatat sektor yang menyumbang emisi GRK terbanyak adalah sektor energi.

Analisa lain dari sisi biaya lingkungan (*environmental costs*) atas aktivitas seluruh sektor ekonomi Indonesia melalui Tabel Input-Output BPS 2010 oleh Pirmina et al. (2021) memaparkan bahwa total biaya lingkungan di Indonesia pada 2010 mencapai Rp 915,11 triliun, nilai ini setara dengan 13% PDB Indonesia 2010. Meskipun studi ini menggunakan data 12 tahun lalu, namun masih relevan untuk menggambarkan seberapa besar biaya lingkungan yang harus ditanggung Indonesia atas degradasi lingkungan yang terjadi dari aktivitas ekonomi.

Lebih rinci, sekitar 38% dari biaya degradasi lingkungan diakibatkan oleh polusi lingkungan. Kemudian 55% akibat biaya penipisan SDA tidak terbarukan (sumber daya mineral) dan 6,7% akibat degradasi sumber daya hutan. Biaya lingkungan Indonesia terlampau besar dan akan terus naik seiring meningkatnya aktivitas ekonomi di negara ini. Apabila tidak segera dilakukan transformasi ekonomi berkelanjutan sesuai prinsip-prinsip dalam ekonomi hijau, dalam jangka pertumbuhan ekonomi Indonesia justru menjadi bumerang untuk kelangsungan hidup penduduk Indonesia.



## Aksi untuk Mewujudkan Ekonomi Hijau

Aksi untuk mewujudkan ekonomi hijau di Indonesia dikerucutkan dalam 5 (lima) kelompok sektor. Masing-masing sektor ini memiliki target jangka pendek (2015-2020), jangka menengah (2020-2030), dan jangka Panjang (2030-2050). Berikut faktor pemungkin dijalankan dalam jangka pendek:



### Energi & Sektor Ekstraktif

- ✓ Penilaian secara regional untuk menentukan solusi energi yang tepat.
- ✓ Menyelidiki hambatan lokal untuk pengembangan investasi dan transfer pengetahuan.
- ✓ Mengevaluasi tarif *feed-in*.
- ✓ Gas domestik sebagai bahan bakar perantara.
- ✓ Meningkatkan nilai tambah dalam pengolahan mineral.



### Manufaktur

- ✓ Insentif fiskal untuk efisiensi energi.
- ✓ Pelibatan pemain industri kunci dalam efisiensi energi.
- ✓ Investasi riset & pengembangan teknologi bersih untuk bahan pengolahan.



### Konektivitas

- ✓ Membangun struktur kelembagaan dan kapasitas untuk perencanaan kota pintar.
- ✓ Membangun kapasitas kelembagaan untuk transport antar moda.
- ✓ Membangun aliran proyek infrastruktur hijau yang tepat sasaran.



### Sumber Daya Alam Terbarukan

- ✓ Mempercepat inisiatif Satu Peta.
- ✓ Memantau dan memastikan lokasi dan waktu konsesi dan izin.
- ✓ Meningkatkan model inovatif pengelolaan hutan dan lahan gambut.
- ✓ Meningkatkan Program Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan di seluruh kementerian.
- ✓ Meningkatkan produktivitas padi, kelapa sawit, dan komoditas pangan utama lainnya.



## Pasar Sumber Daya Alam Baru

- ✓ Mengembangkan kerangka pasar karbon domestik.
- ✓ Mengembangkan alur prioritas kegiatan.
- ✓ Memperkenalkan tata kelola PES (imbal jasa lingkungan)

## Adaptasi Industri Menuju Green Economy

Amerika Serikat melalui US Bureau of Labor & Statistics mendefinisikan industri hijau sebagai industri yang memproduksi baik barang maupun jasa yang bermanfaat bagi lingkungan atau konservasi sumber daya atau yang melibatkan proses produksi ramah lingkungan atau fokus pada efisiensi sumber daya alam. Langkah konkret yang harus dilakukan Indonesia ialah pengurangan emisi karbon dan efisiensi penggunaan sumber daya, terutama industri-industri yang lahab energi. Menuju *"green industry"* melalui produksi *"eco product"*. Lima fokus yang dibahas dalam *green economy* adalah :

Penggunaan Energi Terbarukan

Efisiensi energi

Pengurangan polusi dan efek rumah kaca

Konservasi sumber daya alam

Kesadaran lingkungan

## Beberapa Tantangan Industri Menuju *Green Economy*



Industri dalam negeri **masih tertinggal dalam riset dan pengembangan** terutama yang dapat diaplikasikan secara multisektoral. Kekinian teknologi juga menjadi syarat utama yang dibutuhkan menuju industri yang berkelanjutan



**Masih banyak perusahaan industri yang menggunakan mesin berteknologi lama** yang cenderung tidak efisien, serta menghasilkan limbah dan polusi tinggi



**Pembiayaan untuk beralih ke peralatan fabrikasi hijau** juga menjadi tantangan tersendiri karena nilainya yang tidak kecil



**Kualitas sumber daya manusia yang belum memadai** terutama dari sisi keahlian, kapasitas, serta pengalaman



**Masih kurangnya insentif, baik fiskal dan nonfiskal** yang mendukung pengembangan industri hijau.

## Rencana untuk Mewujudkan Indonesia 'The Real of Green Economy'

- ✓ Menciptakan dan melaksanakan faktor-faktor pemungkin dan insentif-insentif yang mengurangi risiko kepada investor dan bisnis yang tertarik untuk menerapkan praktik-praktik berkelanjutan dan teknologi hijau.
- ✓ Menata ulang kebijakan, rencana dan proyek-proyek nasional dan daerah untuk memastikan bahwa manfaat sosial dan lingkungan dan biaya sepenuhnya terintegrasi dari awal.
- ✓ Membangun kapasitas dan lembaga, serta menjamin tata kelola yang baik, untuk mendukung kebijakan, insentif, rencana, dan proyek pertumbuhan ekonomi hijau.
- ✓ Mengukur kemajuan pertumbuhan hijau



**Indikator gabungan untuk kualitas aset lingkungan**



**Indikator gabungan untuk mengukur tingkat efisiensi sumber daya, air, energi, emisi rumah kaca**



**Indikator gabungan kebijakan, mengetahui kemajuan secara keseluruhan dalam hal kapasitas, tata kelola, adaptasi dan penciptaan lapangan pekerjaan hijau, tingkat keberhasilan kebijakan utama**

Sumber Foto: detik.com

## Catatan Inspirasi:

### Bank Sampah Dansen Sejahtera



Sumber Foto: Dokumentasi pribadi

Bank Sampah Dansen Sejahtera yang berlokasi di Jalan Danau Sentarum, Gang Bersatu, Pontianak, Kalimantan Barat, dan dimotori oleh Nawati menciptakan salah satu inovasi yang unik. Inovasi tersebut berupa kerajinan bercat warna-warni yang merupakan tempat sampah yang dibuat dari hasil daur ulang ban bekas. Berangkat dari bank sampah, Nawati berinovasi menciptakan produk ramah lingkungan. Ban yang dibeli dari para pengepul maupun masyarakat itu diolah sedemikian rupa, hingga dirakit menjadi aneka produk, mulai dari tempat sampah, pot bunga, pot buah, hingga kaki meja kaca. Produk yang dijual mulai harga 100 hingga 300 ribu rupiah ini menjadi salah satu potensi usaha di masa pandemi.

Produk kreatif itu pun mulai dilirik oleh masyarakat untuk kebutuhan rumah tangga. Tidak hanya memproduksi produk kreatif daur ulang, Nawati juga memberdayakan masyarakat sekitar sebagai pekerja untuk mengolah ban bekas tersebut. Selain bernilai ekonomi, tentu produk ini juga dapat menyelamatkan potensi kerusakan lingkungan, dari limbah yang sulit terurai.

## Daftar Pustaka

*Indonesia*. (n.d.). GGGI - Global Green Growth Institute. Retrieved April 25, 2022, from <https://gggi.org/country/indonesia/>

*Green economy*. (n.d.). UNEP - UN Environment Programme. Retrieved April 25, 2022, from <https://www.unep.org/explore-topics/resource-efficiency/what-we-do/policy-and-strategy/green-economy>

Pemerintah Indonesia - Global Green Growth Institute (GGGI) Program. (2015). *Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Hijau di Indonesia: Peta jalan untuk Kebijakan, Perencanaan, dan Investasi*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. <http://greengrowth.bappenas.go.id/tentang-kami/>

Rizaty, M. A. (2021, October 8). *Luas Lahan Berhutan Indonesia Berkurang 1,6 Juta Ha Sepanjang 2014–2019*. katadata. Retrieved April 25, 2022, from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/08/luas-lahan-berhutan-indonesia-berkurang-16-juta-ha-sepanjang-2014-2019>

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2021). *Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan Monitoring, Pelaporan, Verifikasi (MPV)*. Direktorat Inventarisasi GRK dan MPV KLHK. [http://ditjenppi.menlhk.go.id/reddplus/images/adminppi/dokumen/igrk/LAP\\_igrk2020.pdf](http://ditjenppi.menlhk.go.id/reddplus/images/adminppi/dokumen/igrk/LAP_igrk2020.pdf)